



Bappeda Rancang Jalan Lingkar Kota

“Istilahnya sekarang baru orak-orek kasar, belum ada desain mendetail. Nanti waktu *feasibility study* baru kelihatan, mana yang layak, kelebihannya apa, kekurangannya apa.”

GEDE DHARMAJA

Kepala Bappeda Buleleng

Kurangi Kepadatan di Kota Singaraja

BANJAR – Badan Perencana dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng kini tengah mengkaji kemungkinan dibangunnya jalan lingkar Kota Singaraja. Pembangunan jalan lingkar itu diharapkan bisa mengurangi kepadatan arus kendaraan yang ada di wilayah Kota Singaraja.

Selama ini arus kendaraan di Kota Singaraja, memang terbilang padat. Kepadatan itu terlihat di Jalan Surapati, Jalan Gempol, Jalan Imam Bonjol, hingga Jalan Diponegoro. Jalan lingkar kota, diharapkan mengalihkan arus kendaraan, sehingga pengendara tak melalui tengah Kota Singaraja. Terutama bagi kendaraan-kendaraan yang menuju arah Denpasar serta Seririt.

Kepala Bappeda Buleleng Gede Dharmaja mengatakan, rencana pembuatan ruas lingkar Kota Singaraja, sudah melalui tahap studi kelayakan sejak tiga tahun lalu. “Rencananya tahun ini kami mulai

melakukan kajian,” kata Dharmaja, yang ditemui di Desa Temukus, Sabtu (28/3).

Dharmaja mengatakan, ruas lingkar kota, diharapkan bisa menyambungkan jalur kendaraan dari Kelurahan Su-

kasada, hingga poros tengah jalur Kota Singaraja di Desa Tukadmungga. Jalur-jalur mana saja yang digunakan, nanti akan dikaji lebih detail melalui *feasibility study*.

“Istilahnya sekarang baru

orak-orek kasar, belum ada desain mendetail. Nanti waktu *feasibility study* baru kelihatan, mana yang layak, kelebihannya apa, kekurangannya apa,” imbuhnya.

Rencananya akan dibuat jalur lingkar Kota Singaraja, mulai dari Kelurahan Penarukan yang tembus hingga Kelurahan Sukasada, dan berlanjut hingga ke Kawasan Wisata Lovina. Hanya saja, pembuatan jalur poros itu terkendala keberadaan Jembatan Sangket yang jalurnya dinilai terlalu terjal. (eps/gup)

Edisi : Minggu, 29 Maret 2015

Hal : 29



Dewan Minta Pemkot Transparan

Atas Hasil Audit BPK

DENPASAR - Dugaan penyelewengan dana yang terjadi di Kota Denpasar terus didalami Kejari Kota Denpasar. Bahkan untuk membuktikan temuan BPK RI beberapa waktu lalu tersebut, dikabarkan dua pejabat Pemkot Denpasar sudah diperiksa Kejari Denpasar.

Informasi tersebut akhirnya mendapat respons dari salah satu anggota DPRD Kota Denpasar AA Susruta Ngurah Putra. Dewan asal Partai Demokrat tersebut mengatakan, seharusnya pemerintah Kota Denpasar meski transparan mengenai hal tersebut. Bukan hanya itu pemerintah juga harus berbicara dan menjelaskan kepada masyarakat atas temuan BPK

RI tersebut agar tidak ada kesan Pemkot Denpasar tertutup.

"Saya rasa pemerintah Kota Denpasar jangan sampai seolah tidak melihat apa yang terjadi saat ini. Kesempatan Pemkot saat ini untuk menjelaskan hasil pemeriksaan BPK RI tersebut," tegasnya saat dihubungi koran ini, Sabtu kemarin (28/3).

Dikatakan Susruta, temuan BPK RI atas beberapa dana yang tidak jelas seperti disebutkan oleh Kejari Denpasar beberapa lalu, meski dibuka dan harus ditelusuri oleh Kejari Denpasar, jangan sampai kasus-kasus seperti itu terhenti karena alasan yang tidak jelas. "Ini saya rasa harus tuntas, jika ada terjadi penyelewengan seperti yang disebutkan. Kejari



DOK. RADAR BALI

AA Susruta Ngurah Putra

Denpasar harus benar-benar mengawal, jangan sampai lepas," ujarnya.

Tidak hanya itu, menurut Susruta, data temuan yang bersumber dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI Wilayah Bali yang diteruskan ke Kejari Denpasar tersebut menjadi

pedoman dasar yang harus ditindaklanjuti.

"Saya hanya berharap agar semuanya terang dan cepat terungkap. Saya tidak ingin melihat temuan ini terputus begitu saja, dan Pemkot Denpasar harus mengakui jika pejabatnya ada yang diperiksa," sindir politisi Partai Demokrat ini.

Dari informasi sebelumnya, berdasarkan hasil audit BPK RI tahun 2013 yang diserahkan tahun 2014 yang bernomor 03.A/LHP/XIX.DPS/05/2014 tertanggal 28 Mei 2014 tersebut terungkap ada beberapa temuan. Seperti, pencatatan Penerimaan dan Penyeteroran Pajak dan PFK (Penghitungan Pihak ketiga) tahun 2013 tidak tertib Rp 39.193.490.303 (Rp 39 miliar lebih). Pengang-

garan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal sebesar Rp 45.074.291.153 (Rp 45 miliar lebih) tidak sesuai ketentuan. Penataan Aset tidak tertib, barang Rp 6.801.106.287 (Rp 6,8 miliar) tidak diketahui keberadaannya. Serta penerapan Pencatatan Aset tetap belum optimal, Rp 35.569.292.417 (Rp 35,5 miliar lebih) masih ditelusuri. Selain itu, ada beberapa temuan juga dalam hal kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada. Sebelumnya, pihak Pemkot melalui Kabag Humas IB Rahoela enggan memberikan banyak keterangan, saat dikonfirmasi terkait kabar dua pejabat Pemkot diperiksa Kejari tersebut. (hen/han)

Edisi : Minggu, 29 Maret 2015-

Hal : 24



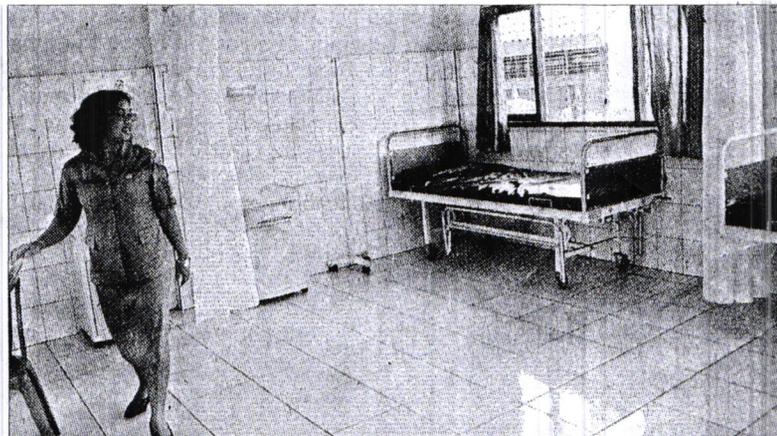
Memaksimalkan Fungsi
Puskesmas di Perbatasan

Kunjungan Dokter Spesialis Setahun Sekali

Bali sukses mengangkat industri pariwisata secara internasional. Namun, belum maksimal mengangkat derajat kesehatan masyarakatnya. Khususnya di perbatasan kabupaten/kota. Benarkah?

DI kawasan perbatasan kabupaten/kota se Bali, sebagian besar berdiri pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Baik untuk rawat jalan maupun rawat inap (puskesmas pratama). Namun, belum semuanya sesuai harapan ■

► Baca **Kunjungan...** Hal 31



KADER MERTAWAN/RADAR BALI

BUTUH DOKTER SPESIALIS: Kepala Puskesmas Rendang, Karangasem, Ni Komang Ayu Trisnahari tunjukkan bed pasien rawat inap yang kosong.

Layanan Kesehatan di Perbatasan Kabupaten/Kota

1. Karangasem, dari 12 puskesmas induk, enam di antaranya puskesmas rawat inap, buka 24 jam. Kendalanya, belum ada dokter spesialis.
2. Buleleng, punya dua puskesmas jauh dari ibukota kabupaten; Puskesmas Busungbiu II dan Puskesmas Gerokgak II. Ambulans siaga 24 jam, terintegrasi Buleleng Emergency Servis (BES).
3. Jembrana, memiliki 10 puskesmas di lima kecamatan, lima di antaranya puskesmas rawat inap.
4. Klungkung, untuk Nusa Penida ada Puskesmas I Nusa Penida dan Puskesmas Nusa Penida II di Jungut Batu, Lembongan. Memiliki ruang rawat inap dan buka 24 jam, tapi SDM kurang.
5. Deppasar, anggarkan 10 persen dari APBD untuk kesehatan.
6. Gianyar, untuk Puskesmas Pembantu Kecamatan (PPK) I, punya dokter umum.
7. Badung, bangun 12 puskesmas induk di enam kecamatan. Di Kuta, masih terkendala lahan.



GRAFIS: DYAH FEDIAWATURADAR BALI

Edisi : Minggu, 29 Maret 2015

Hal : 22 dan 31



Radar Bali

Sambungan -

Badung Terkendala Lahan di Kuta

■ KUNJUNGAN...

Sambungan dari hal 21

Di Karangasem, dari 12 puskesmas induk, enam di antaranya puskesmas rawat inap, buka 24 jam. Lokasinya, jauh dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karangasem. Yakni; Puskesmas Rendang, Sidemen, Selat, Manggis I, Kubu I, dan puskesmas di Seraya.

Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem IGM Tirtayana mengaku, masih ada kekurangan di puskesmas rawat inap. Salah satunya, keberadaan dokter spesialis yang paling dibutuhkan masyarakat. Seperti dokter spesialis kandungan dan anak. "Sampai sekarang, memang belum ada dokter spesialis yang tugas di puskesmas, walaupun puskesmas rawat inap," kata Tirtayana, akhir pekan kemarin.

Dua dokter spesialis itu, sebatas dokter kunjungan. Itupun, dilakukan setahun sekali. Hal tersebut, terpaksa dilakukan lantaran minimnya dokter spesialis tersebut di Karangasem. Kata Tirtayana, hanya ada empat orang dokter spesialis kandungan, dan satu orang spesialis anak. Tak sebanding, dengan jumlah puskesmas. Saat ini, dokter spesialis itu bertugas di RSUD Karangasem. "Hitung-hitungannya, kunjungan setahun sekali saja, mereka sudah setiap bulan datang karena ada 12 puskesmas, kalau diatur lebih sering, atau bertugas di puskesmas rawat inap, bisa komplain RSUD," selorohnya.

Sedang Kepala Puskesmas Rendang Ni Komang Ayu Trisnahari juga mengakui, kebanyakan pasien dirujuk ke rumah sakit di Klungkung, ketimbang ke RSUD Karangasem. Hal tersebut bukan hanya keinginan dari Puskesmas setempat saja, tapi juga niat keluarga pasien.

Selain ke Klungkung, rujukan Puskesmas Rendang, juga sering ke RSUD Bangli. Bahkan, lebih sering dibandingkan ke RSUD Karangasem.

Di Buleleng, setidaknya ada dua puskesmas jauh dari ibukota kabupaten; Puskesmas Busungbiu II dan Puskesmas Gerokgak II. Puskesmas Busungbiu II di Desa Pucak-sari, Kecamatan Busungbiu, dengan jarak tempuh 2 jam dari pusat Kota Singaraja. Sementara Puskesmas Gerokgak II ada di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, dengan jarak tempuh selama tiga jam.

Wakil Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra mengakui jika kedua Puskesmas itu berada jauh dari pusat kota. Namun kedua Puskesmas itu sangat penting dalam melayani kesehatan masyarakat, terutama dalam melayani peristiwa gawat darurat.

Meski berada jauh dari pusat kota, Sutjidra menegaskan tidak pernah menganaktirikan puskesmas-puskesmas di perbatasan. Buktinya, kini harus memiliki minimal dua orang dokter. Sehingga pelayanan bisa lebih maksimal.

Dalam hal pelayanan kedaruratan, Sutjidra

rupanya punya trik sendiri. Lantaran Puskesmas Gerokgak II dan Puskesmas Busungbiu II tak bisa melayani rawat inap, pemerintah mengembangkan Puskesmas Busungbiu I di Desa Busungbiu, dan Puskesmas Gerokgak I di Desa Gerokgak, menjadi puskesmas rawat inap, dengan pelayanan 24 jam.

Sehingga ketika terjadi peristiwa gawat darurat, petugas kesehatan tak perlu jauh-jauh menuju RSUD Buleleng. Waktu tempuh dari Puskesmas Busungbiu II ke Puskesmas Busungbiu I, hanya 45 menit. Demikian pula dengan waktu tempuh Puskesmas Gerokgak II ke Puskesmas Gerokgak I.

Di Jembrana, sejumlah puskesmas, terutama di pinggiran kabupaten, seperti Puskesmas Pembantu Desa Manggisari di ujung utara dan berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, gedung dan alat medisnya masih baru. Begitu juga Puskesmas Pembantu Desa Pengragoan di ujung timur Jembrana dan berbatasan dengan Kabupaten Tabanan.

Edisi : Minggu, 29 Maret 2015

Hal : 22 dan 31



Radar Bali

Sambungan-

Menurut Kepala Puskesmas Pekutatan II Nengah Ariani, semua bangunan dan fasilitas medis puskesmas pembantu di Kecamatan Pekutatan masih baru. Puskesmas Pekutatan II yang dipimpinnya merupakan induk dari beberapa puskesmas pembantu di wilayah berbatasan.

Puskesmas Pekutatan II yang merupakan induk puskesmas pembantu statusnya masih puskesmas biasa yang hanya melayani rawat jalan. Standar alat medis dan sarana lainnya juga sudah sesuai dengan standar rawat jalan. Memiliki 4 orang dokter (dokter gigi dan dokter umum), 5 orang perawat, dan 14 bidan.

Salah satu yang masih menjadi kendala adalah tidak ada ambulans di setiap puskesmas pembantu, sehingga warga sering membawa sendiri pasien dengan kendaraan pribadi ke rumah sakit induk atau rawat inap.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Putu Suasta menjelaskan, Jembrana memiliki 10 puskesmas di lima kecamatan, dari 10 puskesmas itu, lima di antaranya puskesmas rawat inap.

Di Klungkung, khususnya di Kecamatan Nusa Penida, termasuk salah satu kawasan tertinggal di Klungkung. Bagaimana fasilitas kesehatan dan paramedisnya? Menurut Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, di Nusa Penida ada dua puskesmas. Yakni, Puskesmas I Nusa Penida dan Puskesmas Nusa Penida II di Jungut Batu, Lembongan.

Namun demikian selain puskesmas pelayanan kesehatan di gugusan pulau terluar Indonesia tersebut juga ada pusat kesehatan desa (puskesdes) dan puskesmas pembantu (pustu).

Di Puskesmas Nusa Penida I dan II sudah memiliki ruang rawat inap dan memberikan pelayanan 24 jam. Bupati mengakui selain menekankan pelayanan, juga menekankan masalah kebersihan. Sementara untuk persoalan sumber daya manusia (SDM) diakui Suwirta masih kurang. "Kalau di Puskesmas tidak ada dokter ahli

termasuk di Nusa Penida," ujarnya.

Sedang di Kota Denpasar, terkait pelayanan kesehatan, anggota DPRD Kota Denpasar AA Susruta Ngurah Putra mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar benar-benar memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya. Terutama bagi masyarakat yang jarak rumahnya jauh dari fasilitas kesehatan.

Kadis Kesehatan Kota Denpasar Luh Putu Sri Armini mengungkapkan, pihaknya sudah menganggarkan sekitar 10 persen dari APBD Kota Denpasar. Dikaitkan mengenai maksimalisasi fasilitas puskesmas sebagai fasilitas rawat inap Armini mengatakan, di Kota Denpasar sendiri pihaknya sudah menyediakan layanan rawat inap.

Bagaimana dengan Gianyar? Kadis Kesehatan Gianyar Ida Ayu Cahyani belum lama ini mengungkapkan, khusus untuk beberapa wilayah Gianyar yang ada di perbatasan pada dasarnya memang disiapkan pelayanan kesehatan tak jauh beda dengan di pusat kota. Takheran pula, beberapa masyarakat daerah lainnya di Bali yang terbitang dekat dengan Gianyar, banyak pula yang memilih berobat ke wilayah Gianyar.

"Kalau puskesmas rawat inap, memang ada di semua kecamatan. Kalau untuk yang agak jauh, ada itu di Kecamatan Tampaksiring, Payangan, dan Tegallalang. Di tiga kecamatan itu saat ini sudah ada (puskesmas rawat inap, Red), seperti Puskesmas Tampaksiring I, Puskesmas Tegallalang I dan Puskesmas Payangan," katanya.

Menurutnya, di perbatasan, banyak warga dari luar kabupaten, berobat di Gianyar. Dicontohkan, di Puskesmas Payangan, cukup banyak warga masyarakat dari Kintamani (Bangli) yang berobat. Peralnya lokasinya memang cukup berdekatan. Terlebih di beberapa desa di Gianyar yang ada di wilayah perbatasan juga tersedia puskesmas pembantu.

Sementara itu, Pemkab Badung tidak mempunyai puskesmas khusus di perbatasan dengan kabupaten lain. Namun, Badung membangun puskesmas di setiap kecamatan. Setidaknya ada 12 puskesmas induk di enam kecamatan. Rinciannya, empat di Kecamatan Abiansemal, tiga di Mengwi, dua di Petang dan Kuta, serta satu masing-masing di Kuta Utara dan Kuta Selatan.

Kepala Dinas Kesehatan Badung, I Gede Putra Suteja memaparkan, setiap kecamatan terdapat satu puskesmas yang melayani rawat inap dan buka 24 jam. "Puskesmas ini bisa melayani siapapun, tak terkecuali yang mengalami insiden kecelakaan atau gawat darurat," tutur Suteja, kemarin (28/3).

Untuk Kuta yang kerap terjadi kecelakaan dan kriminalitas, namun hanya memiliki dua puskesmas, bahkan Kuta Utara dan Selatan hanya mempunyai satu puskesmas, Suteja berdalih terkendala lahan. Katanya, di Kuta tidak ada lahan bisa dibangun puskesmas. **(kadek mertawan/ eka prasetya/ m. basir/ wayan putra/ hendri harliawan/ nyoman widiadyana/ maulana sandijaya/ djo)**

Edisi : Minggu, 29 Maret 2015

Hal : 22 dan 31